



## Peran Pembelajaran PPKn dalam Mempengaruhi Persepsi Siswa terhadap Dinamika Pemilu 2024 di SMA Negeri 6 Palangka Raya

Veronika Lumban Gaol<sup>1\*</sup>, Asep Ikbal<sup>2</sup>, Benget Tampubolon<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Palangka Raya, Indonesia

<sup>3</sup>Guru SMA Negeri 6 Palangka Raya, Indonesia

E-mail: [veronikalumbangaol569@gmail.com](mailto:veronikalumbangaol569@gmail.com), [asepikbal@fkip.upr.ac.id](mailto:asepikbal@fkip.upr.ac.id), [tampubolonbenget03@gmail.com](mailto:tampubolonbenget03@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-01-11 Revised: 2024-02-23 Published: 2024-03-13  <b>Keywords:</b> <i>PPKn Subjects; Political Participation of Novice Voters; Perception of 2024 Elections.</i>	This study aims to find out how the role of PPKn subjects on the participation of novice voters in the 20-24 presidential election. This research is motivated by students who are able to apply PPKn subjects in everyday life. So that the formulation of the problem in this study is: How are the attitudes, participation, and relationship of PPKn subjects with the 20-24 presidential election. This study used observation and interview methods, the subject and object in this study were SMA Negeri 6 Palangka Raya and the object was class XII students. Data collection and research instruments used in this study by disseminating questionnaires to students which are used as concrete data in this study. The results showed that (1) PPKn subjects were able to increase the participation of novice voters. (2) sources of political information and political world problems. (3) perceptions and stigmas formed after seeing the existing political world.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-01-11 Direvisi: 2024-02-23 Dipublikasi: 2024-03-13  <b>Kata kunci:</b> <i>Peran Mata Pelajaran PPKn; Partisipasi Politik Pemilih Pemula; Presepsi Terhadap Pemilu 2024.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mata pelajaran PPKn terhadap partisipasi para pemilih pemula dalam pemilihan presiden tahun 2024. Penelitian ini di latarbelakangi pada peserta didik yang mampu menerapkan mata pelajaran PPKn dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana sikap, partisipasi, dan hubungan mata pelajaran PPKn dengan pilpres 2024. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara, subjek dan objek dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 6 Palangka Raya dan objek nya adalah peserta didik kelas XII. Pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penyebaran angket kepada peserta didik yang dijadikan sebagai data konkret dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mata pelajaran PPKn mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula. (2) sumber sumber informasi politik dan permasalahan dunia politik. (3) presepsi dan stigma yang terbentuk setelah melihat dunia politik.

### I. PENDAHULUAN

Media pembelajaran merupakan sarana penyampaian pesan-pesan selama proses pembelajaran. Penggunaan media sangatlah penting, tidak mungkin terkoordinasinya kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan media. Media bersifat fleksibel karena dapat digunakan untuk semua tingkatan siswa dan dalam semua kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dan mengontrol pembelajaran sendiri serta memiliki pandangan jangka panjang terhadap pembelajarannya.

Pada dasarnya peran media pembelajaran PPKn dapat mempengaruhi pola pikir dari setiap pemilih pemula di sekolah, dimulai dari bagaimana sebenarnya standar atau syarat-syarat yang harus diketahui sebelum memberikan hak pilih kita. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2015, hlm 1).

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wadah bagi pelajar untuk memperoleh pendidikan politik guna untuk dapat memahami sistem politik yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu, PPKn berfungsi sebagai pendidikan multidimensi karena mempunyai visi sebagai pembangun bangsa dan karakter, ilmu politik sebagai akar ilmu dan penelitian interdisipliner, politik, karakter, demokrasi, pendidikan hak asasi manusia (HAM), anti korupsi sebagai misi PPKn.

Dilihat dari segi spesifiknya bahwa PPKn atau pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan pada bagaimana warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik

bangsanya. Pendidikan politik penguatan pendidikan karakter (PPK) bertujuan untuk membantu mendidik warga negara menjadi siap dan matang secara politik dan turut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Pemilihan Umum (Pemilu) sering juga disebut sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh suatu negara. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan kunci terwujudnya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan wujud nyata demokrasi dan juga cara rakyat mendeklarasikan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan berdasarkan asas langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Di antara banyak negara yang mengadakan partisipasi politik terhadap pemilih pemula, kini semakin sangat rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Generasi muda saat ini semakin skeptis dan sinis atau apatis terhadap politik. tanpa disadari justru karena sikap apatis tersebut masyarakat bisa tertipu oleh penguasa, sehingga dalam hal ini diasumsikan bahwa peran mata pelajaran PPKn adalah membantu siswa memahami dunia politik, sehingga siswa menjadi warga negara yang cerdas dalam memilih yang dapat dipercaya sebagai pemimpin negara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti Di SMA Negeri 6 Palangka Raya melalui wawancara terhadap guru dan siswa kelas XII IPA & XII IPS, yaitu peran mata pelajaran PPKn dan sejauh mana pemahaman siswa sebagai pemilih pemula di pemilu 2024 yang akan mendatang tentu peran pembelajaran pkn membantu dalam memahami tentang politik pemilu. Akan tetapi ada beberapa hal menjadi permasalahan yang terjadi seperti beberapa siswa cenderung masih kurang paham bagaimana seharusnya cara memilih yang seharusnya, salah satu permasalahan yang banyak terjadi saat pemilihan yaitu banyak nya pemilih pemula lebih terpengaruh dengan uang atau yang disebut money politik dimana permasalahan ini cenderung mengincar anak muda.

Meski suap jenis ini tidak diatur secara hukum, namun menurut pengawas pemilu, hal tersebut dapat ditegakkan dalam hukum pidana. Ayat 1 dan 2 KUHP dapat diterapkan pada pelaksanaan kebijakan moneter. Namun faktanya masyarakat malah menganggapnya lumrah atau biasa saja, dan mereka yang ingin menjadi tokoh masyarakat biasanya tidak peduli. Selain

permasalahan di atas, banyak juga permasalahan di lapangan, misalnya pendatang baru yang hanya mau memilih, tidak peduli dengan visi dan misi calon karena ingin mengikuti masyarakat atau keluarganya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah disebut pula metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Purnasari, 2021). Pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang didasarkan pada data yang ada atau penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan masalah (Nugraheni Arumsari, 2020). Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan data kualitatif sebagaimana adanya, dan kemudian data tersebut dianalisis makna dibalik fakta yang tampak. Mengikuti (Dea Aulia Indriyana, 2023) penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini hendak menggambarkan secara kualitatif mengenai peranan dan hambatan guru PPKn SMA Negeri 6 Palangka Raya Dalam Mempersiapkan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum. Dengan jenis penelitian ini maka peneliti memperoleh dan mengumpulkan data dengan dua metode yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menyimpulkan, setelah melakukan wawancara dengan siswa, bahwa pendidikan kewarganegaraan selama ini sangat memengaruhi pemahaman siswa terhadap sistem pemilu secara umum. Dimana hal ini tercermin dalam pemahaman siswa menjelaskan bagaimana pilihan secara umum terlihat dan seharusnya. Di dalam hasil penelitian ini peneliti juga menjelaskan beberapa poin penting mengenai persepsi siswa SMA N 6 Palangka Raya terhadap dinamika pemilu 2024, mulai dari isu politik, sumber informasi politik, isu politik pemilih pemula, pembentukan persepsi dan stigma pemilih. Siswa yang menjadi informan tentunya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga pemahaman mereka terhadap politik juga sangat berbeda-beda, sehingga keterbatasan akses juga dapat menjadi kendala dalam menerima informasi politik dan juga pemahaman dalam politik.

Aktivitas siswa berdiskusi tentang dunia politik dan memperoleh informasi politik tidak hanya berasal dari sekolah atau pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga dari berbagai

media sosial. hal lain yang dapat membantu siswa yaitu dengan menonton kegiatan debat antar calon kandidat, dimana hal tersebut merupakan salah satu cara untuk aktif dalam memahami politik.

#### **A. Isu Politik Sebagai Bahan Komunikasi**

Isu politik biasanya dibicarakan melalui media mainstream seperti koran, berita televisi dan akhirnya secara kongkrit dibicarakan oleh siapa saja pada lapisan masyarakat terlebih menjelang PEMILU pada dasarnya komunikasi tersebut merupakan komunikasi politik dimana pertukaran informasi antara elite penguasa kepada warga negara melalui media dengan simbol-simbol politik yang telah diproses kepada ruang publik untuk memberikan efek potensial dan aktual pada fungsi sistem politiknya (Mulkanur Rohim<sup>1\*</sup>), Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik ).

Proses komunikasi politik merupakan tahapan komunikasi politik untuk menerima umpan balik, dimana siswa yang menerima pertanyaan politik berusaha menyampaikan pesan kepada temannya agar mendapat respon terhadap apa yang dikomunikasikan. Dalam proses tersebut bentuk proses komunikasi meliputi beberapa tahapan, seperti konsep Burhan Bungin (Mulkanur Rohim<sup>1\*</sup>), persepsi siswa terhadap dinamika pemilu). Selama proses pembahasan politik siswa dapat menggunakan debat di forum media sosial mengenai topik politik yang sedang populer dan akan memberikan bentuk dukungan dari mereka terhadap kandidat pemerintah pilihan mereka dengan memberikan umpan balik positif dan dukungan lainnya. Seperti yang terjadi di SMA N 6 Palangka Raya, terlihat antusiasme mereka untuk memilih presiden di tahun mendatang, banyak siswa yang berebut dukungan melalui media sosial, twitter, tiktok, whatsapp dan media lainnya. siswa memberikan dukungan untuk membentuk komunikasi tentang politik elektoral.

#### **B. Sumber-Sumber Informasi Politik**

Sumber informasi yang diterima siswa dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMA N 6 Palangka Raya selama penelitian berlangsung, yaitu: PPKn, Keluarga/Komunitas, Media Sosial, Sekolah/Teman. Keempat sumber informasi di atas merupakan media yang sering diperoleh mahasiswa untuk mendapatkan informasi

politik. Peran pembelajaran PPKn sangat banyak menumbuhkan kesadaran politik bagi para siswa, sehingga mendominasi bahwa pembelajaran PPKn merupakan suatu pembelajaran yang memberikan arahan tentang unsur-unsur politik yang baik dan benar. Oleh karena itu Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wadah bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan politik sesuai dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Selain itu, PPKn memiliki fungsi sebagai pendidikan multidimensi, karena memiliki visi sebagai nation and character building, ilmu politik sebagai akar keilmuan dan sebagai kajian interdisipliner, sebagai pendidikan politik, karakter, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), anti korupsi sebagai misi dari PPKn. (Pratiwi Hestu Utami dan Suyato).

Namun media sosial juga hampir sama dengan pembelajaran PPKn yang banyak membantu siswa dalam mendapatkan informasi tentang politik, Di SMA N 6 Palangka Raya untuk mendapatkan pengetahuan nyata dan global Media sosial digunakan siswa untuk mencari topik politik untuk dibicarakan. Karena media sosial merupakan salah satu media yang paling cepat dalam menyampaikan informasi, namun dalam hal mendapatkan informasi dari media sosial, peneliti berharap siswa tidak hanya membaca dari satu sumber saja, namun mencarinya dari beberapa sumber lain, dan tentu saja, jangan sampai terjerumus ke dalam penipuan atau hoax.

Calon Kandidat politik di Indonesia saat ini bersaing untuk mendapatkan perhatian generasi muda mulai dari media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter dan media lainnya, dengan mempertunjukkan visi misi dan hasil dari kinerja yang sudah mereka capai, guna untuk mendapatkan perhatian dari anak muda saat ini. kebanyakan konten yang dibuat cenderung tertuju untuk mengikat perhatian dari siswa sekolah menengah. Trend yang ada di tiktok yang sangat ramai akan dimanfaatkan oleh setiap kandidat untuk dapat menarik perhatian dari anak muda saat ini. Peran keluarga juga dapat menumbuhkan kesadaran dalam kehidupan politik, peran orang tua juga sangat mempengaruhi dari segi buruk dan dari segi baiknya yang akan dibawa anak-anak Mas'oed, (2008 hlm,47) menjelaskan bahwa pengalaman berpartisipasi keluarga dalam pembuatan keputusan dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi politik, interaksi politik serta berpartisipasi dalam sistem

politik ketika sudah dewasa. Semua sosialisasi keluarga yang dijalankan dalam pembahasan politik memberikan dampak pada pendidikan politik, (Kantaprawira, 2004 hlm 55) menjelaskan bahwa pendidikan politik meningkatkan pengetahuan siswa untuk berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya (Mulkanur Rohim<sup>1\*</sup>), : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik )

Keikutsertaan saudara ataupun teman dalam perolehan sumber informasi terbagi menjadi dua, pertama sebagai konfirmasi atas informasi yang diterima dan kedua sebagai pertentangan informasi yang diterima dari teman dengan informasi yang diterima informan sendiri. Pada saat yang sama, sekolah hanya mendukung perantara seperti majalah sekolah dan akses guru terhadap informasi. Oleh karena itu penyajiannya lebih bersifat normatif dan dogmatis, walaupun masing-masing siswa telah mempunyai acuan tersendiri dalam memilihnya, namun ia tidak memperdebatkan nilai-nilai siswa sekolah yang dianut siswa dalam sikapnya terhadap guru dan sekolahnya.

### **C. Permasalahan Politik Pemilu Terhadap Pemilih Pemula**

Pada awalnya pemilu serentak diharapkan dapat memperbaiki penyelenggaraan pemilu agar lebih efektif. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK berpendapat bahwa pemilu serentak mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal dalam masyarakat pada masa pemilu, dan di samping itu warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan efektif melalui pemilu. pemilu serentak dapat membantu proses demokrasi yang baik tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu terutama yang berkaitan dengan perundingan politik antar partai sebelum pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang seringkali dilakukan atas dasar kepentingan langsung, demi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya dan dalam jangka panjang.

Pasal 515 Undang-Undang Parlemen Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyatakan: "Setiap orang yang dalam masa pemilu dengan rela menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih untuk mencegahnya menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu. memilih hak mereka

untuk memilih dengan cara tertentu, sehingga surat suara mereka batal, dapat dihukum penjara hingga tiga tahun dan denda hingga 36 juta. "Namun pada bukti dilapangan penggunaan money politik dianggap sudah lumrah ataupun sudah hal biasa ketika adanya pemilu, tanpa masyarakat sadari hal tersebut membuat pola pikir dari generasi muda yang masih awam dalam dunia pemilu akan mengikuti kebiasaan dari masyarakat itu sehingga dapat merusak generasi penerus bangsa.

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga Negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih dan sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2 ) Undang-Undang No 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak untuk memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggaraan pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dalam hal ini sudah tercantum syarat-syarat dalam memilih akan tetapi banyak dari masyarakat tidak mengetahui hal tersebut karena kurangnya wawasan ataupun informasi terutama didaerah pedesaan.

### **D. Presepsi dan Stigma Yang Terbentuk Terhadap Pemilu**

Meskipun persepsi dan stigmatisasi di benak siswa masih bersifat parsial dan terkadang terdapat unsur subjektif, namun dalam pengelolaan informasi seringkali terjadi kesalahan komunikasi antara siswa dengan siswa lainnya. Mengenai tentang pemungutan suara. Begitu pula dari hasil wawancara pengetahuan politik siswa SMA N 6 Palangka Raya bahwa guru PPKn sangat banyak membantu memberikan pemahaman politik dan juga teman sebaya yang berdiskusi tentang politik. Stigma yang muncul setelah menerima informasi tentang dunia politik terbagi menjadi dua varian yaitu positif dan negatif. Perbedaan stigma yang muncul biasanya disebabkan oleh perbedaan persepsi dan latar belakang individu, karena jika awalnya memiliki paradigma negatif, maka persepsi mereka terhadap pilihan tersebut mungkin negatif dan sebaliknya. Dengan adanya stigmatisasi ini, pemilih tidak lagi dihadapkan pada pilihan apa yang benar dan apa yang terjadi, melainkan pemilih akan mencari atau memperoleh informasi berita

yang dapat memperkuat pilihan yang sesuai dengan latar belakang dari pada calon kandidat tersebut.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Di dalam proses menyiapkan pemilih pemula peran pembelajaran PPKn dikatakan mampu untuk memberikan pemahaman terhadap para siswa yang masih retan diumur 17-18 tahun yang cenderung masih labil sehingga dapat menyebabkan remaja sulit mendapatkan informasi yang siswa sangat butuhkan. Peran pembelajaran PPKn menjadi alternatif yang paling berguna yang dapat dijangkau oleh setiap siswa dalam mendapatkan seputar dunia politik, karena didalam proses pembelajaran siswa akan lebih aktif untuk saling bertanya guna untuk dapat memahami mengenai pembelajaran tersebut.

Selain pembelajaran PPKn, sosial media juga sangat memiliki pengaruh yang besar tentang masalah dunia perpolitikan, akan tetapi pemahaman siswa cenderung berbeda-beda dikarenakan dalam bermedia sosial tentu banyak berita yang tidak benar atau hoax, selain dari pada dampak yang negative dampak positif dari sosial media yaitu para siswa dapat melihat gambaran dari calon kandidat, melihat visi dan misi dan program dari kinerjanya sehingga para siswa dapat lebih mudah untuk menentukan pilihannya.

Siswa dari SMA N 6 Palangka Raya memiliki persepsi tentang dinamika pemilu bahwa pilihan politik terbentuk bukan hanya melalui pembelajaran PPKn, media sosial melainkan juga dari orang tua dan masyarakat sekitar. Media sosial memiliki sejumlah informasi mengenai dunia politik, akan tetapi orang tua, teman, dan masyarakat merupakan peran pendukung dan penegas dalam persepsi yang sudah terbentuk didalam diri setiap para siswa. Penelitian ini masih sangat memerlukan pendalaman yang lebih lanjut terutama dalam faktor dari keterlibatan dari keluarga atau teman sekitar agar dapat digeneralisasikan lebih luas pada masyarakat generasi Z yang lebih luas.

##### B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan pemahaman siswa mengenai pemilu, terutama kepada pemilih pemula diharapkan Peran pembelajaran PPKn lebih ditingkatkan dalam memberi-

kan pembelajaran mengenai sistematika dalam pemilu atau pesta demokrasi, karena peran pembelajaran PPKn merupakan wadah pembelajaran utama yang menjadi penyeimbang terhadap stigma yang terbentuk mengenai sistem politik pemilu bagi setiap siswa yang cenderung masih dikatakan pemilih pemula.

2. Diharapkan petugas lingkungan dapat memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diadakan nya pemilu, guna untuk menambah pengetahuan terkait tata cara pemilu nanti, seperti pengurusan pendaftaran pemilih, agar semua masyarakat dapat memberikan Hak suara nya dalam pemilu nanti nya Demokrasi.
3. Orang tua juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap anak mengenai hal buruk yang terjadi jika menerima uang suap/money politic, Yang dimana hal tersebut dapat merusak pola pikir mengenai pemilu dan sistem pemilu.
4. Diharapkan setiap calon pemilih pemula, tidak menggunakan sosial media ke hal yg tidak baik, seperti memberikan ujaran kebencian terhadap pihak lain karena memiliki pilihan yang berbeda, kita sebagai warga Indonesia berhak dalam memilih siapa saja yang menurut kita baik untuk memimpin negara ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara Demokrasi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Cholisin. (Pratiwi Hestu Utami dan Suyato). PKN (Civic Education) sebagai Pendidikan Politik, Pendidikan Demokrasi, Pendidikan HAM. Diktat FIS UNY.
- Dea, A. I. (2023). Metode Penelitian.
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171-179.
- Hasan, M., Milawati, M., Darodjat, D., Harahap, T. K., Tahrim, T., Anwar, A. M., ... & Indra, I. (2021). Media Pembelajaran.
- Kantaprawira, R. (2004). Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Edisi Revisi. Bandung: Sinar Baru Algesindo

- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Bintang*, 2(3), 418-430.
- Mas'oed, M. (2003). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulkanur, R. (2019). Presepsi Siswa Terhadap Dinamika Pemilu. Analisis Politik Milenial: Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada PEMILU 2019 di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 47-63.
- Nugraheni, A. (2020). Peranan Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa.
- Utami, P. H. (2018). THE ROLE OF TEACHER PPKn AS A FACILITATOR OF POLITICAL EDUCATION IN SMK PIRI 1 YOGYAKARTA. *AGORA*, 7(1), 47-60.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.